



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM ALUR SEJARAH POLITIK INDONESIA

Usnia Bahagia Prapta¹, Ulul Azmi², Rizki Parrobi³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, usniabahagiaprapta@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ulula1292@gmail.com.

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, rizkizarobi3@gmail.com.

Abstrak: Pancasila sebagai ideologi negara mengandung makna bahwa Pancasila merupakan kumpulan gagasan, ajaran, doktrin, ilmu, teori, dan landasan yang secara tegas diyakini kebenarannya, dan menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pancasila juga menjadi titik acuan dan landasan dalam menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam alur sejarah politik Indonesia mulai dari masa orde lama hingga era reformasi. Manfaat dari penelitian ini yakni memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai fondasi ideologis bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nyatanya nilai-nilai Pancasila sampai sekarang belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan dalam dunia politik Indonesia. Begitu banyak kegiatan politik yang dilakukan di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu pelanggaran sila-sila dalam Pancasila seakan-akan merupakan hal yang sudah lumrah terjadi sekarang sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut hanyalah menjadi pajangan semata.

Kata Kunci: Orde Lama¹, Era Reformasi², Pancasila³, Ideologi Negara⁴, Politik⁵.

Abstract: Pancasila as a state ideology means that Pancasila is a collection of ideas, teachings, doctrines, sciences, theories, and foundations that are firmly believed to be true, and make it a way of life. Pancasila is also a reference point and foundation in facing challenges and problems faced by the people and government of the Indonesian nation. This study aims to understand the dynamics of Pancasila as a state ideology in the course of Indonesian political history from the old order to the reform era. The benefits of this study are to provide an understanding of Pancasila as the ideological foundation of the Indonesian nation. The research method used in writing the article is the library research method. The results of the study show that in fact the values of Pancasila have not been fully implemented in the world of Indonesian politics. There are so many political activities carried out in Indonesia that are not in accordance with the noble values contained in Pancasila. In addition, violations of the principles in Pancasila seem to be commonplace now so that the values of Pancasila are merely for display.

Keywords: Old Order¹, Reformation Era², Pancasila³, State Ideology⁴, Politics⁵.

*Correspondence Address: usniabahagiaprapta@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia memerlukan suatu kerangka ideologi yang mampu mengakomodasi dan menjaga kebersamaan dalam keragaman tersebut. Ideologi merupakan suatu studi pemikiran manusia yang mampu mengarahkan manusia sesuai dengan batasan tertentu untuk mencapai suatu cita-cita di masa depan. Ideologi dalam lingkup negara diartikan sebagai suatu pandangan negara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, ideologi menjadi mutlak hukumnya dimiliki oleh suatu negara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk identitas kebangsaan serta arah kebijakan politik sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran yang menjadi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aspek yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia semenjak zaman dahulu. Pancasila dikenalkan oleh *founding fathers* Indonesia pada 1 Juni 1945, Pancasila disusun untuk menjawab tantangan keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan budaya. Pancasila mengandung lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari keyakinan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Setiap sila dari Pancasila menggambarkan tujuan, nilai, dan harapan negara Indonesia.

Namun, perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu berjalan dengan linear dan stabil. Pancasila kerap dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan kepentingan penguasa. Negara Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini, namun penerapannya berbeda sesuai dengan masa yang ada. Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri, dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, banyak penyimpangan yang terjadi.

Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan pemahaman histori Pancasila sebagai ideologi dasar negara.. Selain itu penelitian ini memberikan pemahaman tentang dinamika Pancasila dalam sejarah politik Indonesia . Hasilnya juga dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari, dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami dinamika kompleks seiring perubahan politik Indonesia.

METODE | METHOD

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek kajian yang sifatnya alamiah dan sosial di mana instrumen penting ialah peneliti dan nantinya hasil akhir dari penelitian dengan pendekatan ini ialah makna-makna dari sebuah generalisasi (Abdussamad, 2021).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel adalah metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka atau dikenal juga dengan studi literatur menurut George dalam (Djiwandono, 2015) ialah sebuah proses pencarian dari sumber-sumber atau opini para pakar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2017) studi pustaka ialah hal yang berkaitan dengan kajian secara teoretis dan dari sumber referensi lain yang erat kaitannya dengan budaya, nilai dan norma-norma sosial yang sedang berkembang di situasi sosial yang sedang diteliti. Secara garis besar studi pustaka diartikan sebagai sebuah proses penelitian yang bersumber dari penelitian terdahulu yang terbukti secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Pancasila sebagai Ideologi Dasar Negara

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) Nasionalisme, antara Islamisme, Liberalisme, Sosialisme Indonesia, dan Komunisme. Di tengah perbedaan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi nasional untuk menjawab kebutuhan akan pemersatu di tengah perbedaan dan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia (Budiman, 2024).

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung makna bahwa Pancasila merupakan kumpulan gagasan, ajaran, doktrin, ilmu, teori, dan landasan yang secara tegas diyakini kebenarannya, dan menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pancasila juga menjadi titik acuan dan landasan dalam menghadapi tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dapat terwujud. Dalam konteks implementasinya, Pancasila berfungsi sebagai pengatur dan pengarah bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, berbagai tantangan kompleks di dalam praktiknya. Terdapat sejumlah kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.

2. Dinamika Pancasila dalam Sejarah Politik Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, penerapan Pancasila tidak terlepas dari dinamika politik yang silih berganti. Pada masa orde lama, Pancasila berada dalam tekanan pertarungan ideologis antara nasionalisme, agama, dan komunisme yang kemudian dirumuskan oleh presiden Soekarno dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Meski dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik, konsep ini justru menimbulkan ketegangan ideologis dan berkontribusi terhadap krisis politik di pertengahan 1960-an. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain (Pertiwi et al., 2023).

Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dahulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953 Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun

1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan G 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama.

Memasuki orde baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui doktrin tunggal yang tidak dapat diperdebatkan. Program Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dijalankan secara masif dengan narasi tunggal negara mengenai Pancasila. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Dalam konteks ini, Pancasila lebih menjadi alat kontrol politik ketimbang sebagai ideologi dinamis yang hidup dalam masyarakat. Interpretasi tunggal terhadap Pancasila juga kerap menutup ruang kritik dan kebebasan berpendapat. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

3. Pancasila dalam Era Reformasi

Kata 'reformasi' secara etimologis berasal dari kata *reform*, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan (Febriany & Dewi, 2021).

Pasca pemilu 1999, peranan partai politik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partai pun yang menguasai suara mayoritas di parlemen yakni MPR dan DPR, dan juga karena iklim demokrasi sudah menyelimuti kehidupan politik di Indonesia sejak Era Reformasi bergulir di Indonesia. Tatanan politik pun berubah seiring dengan semakin berkurangnya peran dan dwifungsi ABRI dalam ketatanegaraan. Pengangkatan anggota ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri sudah kurang dari periode sebelumnya. Dari 75 kursi yang tersedia menjadi 38 kursi di parlemen. Di MPR tidak ada lagi pengangkatan tambahan selain yang berasal dari DPR, yaitu melalui utusan daerah. Jumlah anggota DPR pascapemilu 1999 sebanyak 500 orang, 462 orang duduk melalui pemilihan umum

sedangkan 38 orang merupakan pengangkatan wakil ABRI. Sedangkan, anggota MPR berjumlah 700 orang, 500 orang dari anggota DPR, 125 orang utusan daerah, dan 75 orang utusan golongan.

Dari konfigurasi politik yang demokratis tetapi tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (dalam DPR), seperti yang telah diuraikan di atas, maka akan sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif adalah sulit bagi presiden untuk menggolkan rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR. Dan di sisi lain, demikian pula terjadi dalam setiap sidang tahunan MPR, presiden harus dapat pula menampung aspirasi fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya.

Sesudah tahun 2002, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila melanggar hukum, bukan karena masalah politik. Dengan konfigurasi politik seperti itu, peranan partai politik menguat kembali seperti pada masa liberal dulu. DPR dan pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pemilu dan susunan DPR, DPRD, DPD dan pemilu langsung sebagaimana pada masa terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik. Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata 'reformasi', yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu, dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi bangsa agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk arah dan identitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi pemersatu berbagai perbedaan ideologis, politik, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan semangat kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi yang sangat relevan

dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Pancasila merupakan dasar filosofi dan ideologi bangsa Indonesia yang telah melewati berbagai dinamika sejarah dan politik sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam perjalanannya, Pancasila telah mengalami tantangan, perdebatan ideologi, serta manipulasi kepentingan politik, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Era Reformasi. Namun demikian, Pancasila tetap menjadi titik temu bagi keberagaman ideologi dan menjadi pijakan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, implementasi Pancasila harus terus dikawal dan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan nyata oleh pemerintah agar nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Reformasi seharusnya tidak menjauh dari semangat Pancasila, melainkan memperkuat perannya dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan berkeadilan. Pancasila harus terus diperkuat dan ditanamkan kepada seluruh warga negara, terutama generasi muda, agar tidak hanya dipahami sebagai simbol negara, tetapi benar-benar menjadi panduan hidup sehari-hari. Pemerintah dan masyarakat luas memiliki tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi dasar yang kokoh dalam membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

REFERENSI | REFERENCE

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Aminullah (2023) 'Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan dan Solusinya', <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index>, 8. Available at: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index>.
- Amren, H. *et al.* (2024) 'Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Menjaga Keutuhan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia', 7(4).
- Andini, M., Dinda, A., Yulinda, Chotimah, & Merliyana. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. EduMaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1).
- Budiman, I.F. (2024) 'Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045', 2(3), pp. 47–54.
- Djiwandono, P. (2015). Meneliti itu tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa. Yogyakarta: Deepublish.
- Febriany, F.S. and Dewi, D.A. (2021) 'Nilai-Nilai Pancasila Dan Dinamika Etika Politik Indonesia', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4).
- Pertiwi, H. *et al.* (2023) Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama Orde Baru Dan Era Reformasi.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wilujeng.,Irbah, J. H.,Sari, I. V., Kuswanto, N. T. P., Rosyidah, E. L (2024) 'Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara', 4(1).